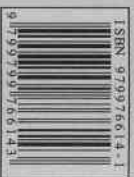


POLITIK ISLAM ANTI KOMUNIS

Pergumulan Masyumi dan PKI di Arena Demokrasi Liberal

Buku ini hadir untuk memperlihatkan salah satu episode politik nasional di masa Demokrasi Liberal, yang memperlihatkan peran Partai Masyumi menghadapi Partai Komunis Indonesia antara 1950 sampai dengan 1957. Cukup banyak buku yang telah membicarakan peran Masyumi ataupun gerakan komunis (PKI). Namun, buku ini secara khusus ingin melihat sisi lain dari pergumulan kedua kekuatan penting dalam sistem politik saat itu. Bagaimana pertarungan wacana dan ideologi antara keduanya adalah sisi penting lain yang layak dicatat.



SAMSURI
POLITIK ISLAM ANTI KOMUNIS

SAMSURI

POLITIK ISLAM ANTI KOMUNIS

Pergumulan Masyumi dan PKI di Arena Demokrasi Liberal


Sufriani Insani Press

POLITIK ISLAM ANTI KOMUNIS

Pergumulan Masyumi dan PKI di Arena Demokrasi Liberal

Samsuri

POLITIK ISLAM ANTI KOMUNIS

Pergumulan Masyumi dan PKI di Arena Demokrasi Liberal



Safaria Insania Press

Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog dalam Terbitan (KDT)

POLITIK ISLAM ANTI KOMUNIS

Pergumulan Masyumi dan PKI di Arena Demokrasi Liberal
Samsuri

Penulis : Samsuri

Penyunting : Suyanto

Penerbit : Safiria Insania Press bekerja sama dengan Magister Studi Islam
Universitas Islam Indonesia

Alamat : Jl. Ring Road Timur No. 39 Nanggung RT. 14 RW 19,

Maguwoharjo Yogyakarta.

Telp/Fax (0274) 484584

E-mail: safiria_insania@plasa.com

Cetakan Pertama, Maret 2004

x + 128 hlm., 15 x 21 cm

ISBN ~ 979 97661 4 1

PENGAKUAN

“KOMUNISME” nampaknya akan selalu menarik untuk dikaji dari perspektif manapun di Indonesia. Meskipun masyarakat internasional sudah enggan membicarakan apalagi memikirkan soal ancaman komunisme setelah Perang Dingin berakhir, bahkan Republik Rakyat Cina sebagai negara komunis kini telah mentransformasikan sistem ekonominya ke dalam mekanisme pasar (kapitalisme), namun di Indonesia terminologi “bahaya komunisme” terus-menerus dipertahankan semenjak rezim Soeharto hingga rezim sekarang. Seolah-olah komunisme adalah “hantu-jahat” yang menakutkan yang harus dipertahankan untuk menghancurkan kekuatan politik anti *status quo*.

Buku ini hadir semata-mata untuk memperlihatkan salah satu episode politik nasional di masa Demokrasi Liberal, yang memperlihatkan peran Partai Masyumi

menghadapi Partai Komunis Indonesia antara 1950 sampai dengan 1957. Cukup banyak buku yang telah membicarakan peran Masyumi ataupun gerakan komunis (PKI). Namun, buku ini secara khusus ingin melihat sisi lain dari pergumulan kedua kekuatan penting dalam sistem politik saat itu.

Bagian besar materi buku ini berasal dari tesis penulis di Program Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2000. Perlu dikemukakan di sini bahwa materi "Pendahuluan" dan Bab I sebagian besar pernah dimuat dalam *Miliah: Jurnal Studi Agama*, Vol. 1, No. 1, 2001. Untuk ini, penulis mohon maaf kepada para pembaca apabila buku masih agak berbau teknis tesis, meskipun sudah dirombak di sana-sini oleh penyunting.

Penulis merasa berhutang budi kepada (alm.) Herbert Feith dan Betty Feith yang secara tulus dan ikhlas telah memberi semangat, bantuan moral dan material yang tak terhingga jumlahnya kepada penulis selama mereka berdua di Yogyakarta. Kepada mereka berdua, karya ini dihaturkan. Ucapan terimakasih disampaikan pula kepada Lance Castles, yang dengan budi baiknya penulis merasakan vitalitas dan suasana akademik selama tinggal bersama beliau di Yogyakarta. Ucapan terimakasih perlu disampaikan kepada Barbara Leigh yang telah memberikan bantuan biaya penelitian kepada penulis ketika itu.

Ucapan terimakasih patut disampaikan kepada Prof. Dr. Faisal Ismail, M.A. (Guru Besar IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan sekarang Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI) yang telah bersedia menjadi pembimbing tesis penulis. Kepada almanater MSI UII Yogyakarta, ucapan terimakasih patut disampaikan di sini. Ucapan terimakasih selayaknya dihaturkan kepada banyak pihak yang telah membantu penulis yang tak bisa disebutkan satu per satu.

Alhamdulillah. Kepada Gini Pratigina dan Alifah Irene Merissi, penulis tak henti-hentinya berterima kasih kepada keduanya. Dengan cinta dan kasih sayang keduanya, penulis mampu bertahan dan bergerak menjalani dinamika kehidupan.

Penulis sangat menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun demikian, semoga buku ini berguna bagi para pembaca.

Yogyakarta, Februari 2004
Penulis

DAFTAR ISI

PENGAKUAN	V
PENDAHULUAN	1
BAB I KOMUNISME DALAM WACANA IDEOLOGI MASYUMI..	9
A. Latar Ideologi dan Pembentukan Masyumi	9
B. Islam Diantara Kapitalisme dan Komunisme	16
C. Sosialisme Religius dan Sosialisme Marxian	22
D. Fatwa Anti Komunis	25
E. Faksi Masyumi Menghadapi Komunisme	30
BAB II KEBIJAKAN POLITIK ANTI KOMUNIS	39
A. Pendahuluan	39
B. Pemerintahan Parlementer	40
BAB III PERTARUHAN IDEOLOGIS PEMILU 1955	75
BAB IV PERDEBATAN IDEOLOGIS DI KONSTITUANTE	87
BAB V MEDIA PENDIDIKAN POLITIK ANTI KOMUNIS	95
A. Materi Pendidikan Politik Masyumi	96
B. Makna Pendidikan Politik Masyumi	100
PENUTUP	105
DAFTAR PUSTAKA	111
INDEKS	123

DAFTAR TABEL

Tabel I.	Aspek-Aspek Ajaran Komunisme yang Bertentangan dengan Islam – 26
Tabel II.	Keseluruhan Perolehan Suara dan Persentase Empat Besar Peserta Pemilu 1955 untuk DPR serta Peringkat Masyumi – 81
Tabel III.	Keseluruhan Jumlah Suara dan Kursi Pemilu 1955 untuk DPR dan Konstituante – 82
Tabel IV.	Daftar Buku Bacaan Keluarga Masyumi - 97

PENDAHULUAN

PERGUMULAN Islam dan Komunisme di Indonesia telah mewarnai perjalanan sejarah modern bangsa ini. Sejak komunisme mulai berkembang pada sekitar 1916 - 1920, hubungan lama yang menyelarah antara Islam dan Komunisme, baik pada masa revolusi fisik ataupun di periode sesudahnya, telah banyak menyita perhatian banyak akademisi.¹ Di masa sekarang, polemik pro-kontra, terutama di kalangan Islam tentang Komunisme menjadi daya tarik tersendiri untuk dikaji di era pasca Perang Dingin, terutama setelah pernyataan permohonan maaf Abdurrahman Wahid ketika masih menjabat sebagai Presiden pada awal tahun 2000 terhadap orang-orang yang menjadi korban penumpasan peristiwa G30S/PKI² serta usulan agar larangan terhadap ajaran Komunisme yang tercantum dalam Tap MPRS No. XXV tahun 1966³ dicabut. Usulan tersebut kemudian menimbulkan

pro dan kontra di kalangan masyarakat untuk beberapa lama.⁴ Sikap pro dan kontra di kalangan Islam terhadap Komunisme sebenarnya dapat dipelajari kembali dari perjalanan politik di Indonesia pasca-kemerdekaan hingga akhir era Demokrasi Liberal tahun 1957. Selama era Demokrasi Liberal tersebut terdapat pergumulan penting yang dilakukan oleh kelompok Muslim dengan kelompok Komunis. Sistem kepartaian yang mendukung kehidupan Demokrasi Liberal mendapat ruang gerak yang setelah Maklumat Pemerintah yang ditandatangani Wakil Presiden Republik Indonesia Mohammad Hatta, dikeluarkan pada tanggal 3 November 1945, tentang pembentukan partai-partai di Indonesia. Melalui maklumat itulah lahir banyak partai politik yang mewakili berbagai aliran ideologi-politik yang tumbuh berkembang di tengah masyarakat.⁵

Bagi umat Islam, maklumat tersebut merupakan peluang untuk membentuk partai politik Islam. Kemudian dibentuklah Partai Masyumi yang direncanakan sebagai satu-satunya partai politik Islam berdasar keputusan Kongres Umat Islam di Yogyakarta pada tanggal 7 - 8 November 1945.⁶ Sebelumnya pernah berdiri Masyumi buatan Jepang pada bulan Oktober 1943.⁷ Berbeda dengan Masyumi buatan Jepang yang oleh Pemerintah Pendudukan Jepang dijadikan sebagai alat untuk mengkooptasi umat Islam demi kepentingannya sendiri, Masyumi hasil Kongres Yogyakarta dimotivasi oleh keinginan untuk menjadikan Masyumi sebagai partai politik tunggal Islam yang dapat menyalurkan aspirasi politik umat.⁸

Suasana revolusi yang sedang bergolak di Indonesia pada awal-awal kemerdekaan dan persaingan dengan berbagai kelompok ideologi, yaitu Nasionalisme dan Marxisme/ Sosialisme dari partai-partai baru tersebut, telah mendorong

tokoh-tokoh politik dan pergerakan sosial keagamaan Islam Indonesia yang telah aktif semenjak zaman pergerakan nasional untuk membentuk "partai tunggal" Islam di Indonesia. "Partai Tunggal" ini, yaitu Masyumi, akan menghimpun semua potensi kekuatan politik Islam. Dengan demikian, partai itu akan memiliki sifat pluralisme di dalamnya, tampak dari ragam aliran pemikiran keagamaan anggota-anggota Masyumi, seperti tercermin dalam suasana federatif keanggotaan istimewa yang terdiri atas organisasi sosial keagamaan, yaitu Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama (NU), Persatuan Islam (Persis), Persatuan Umat Islam (PUJ), Al Irsyad, Jamiyatul Wasliyah, Al Ittihadiyah, dan Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA).⁹

Pandangan dasar modernisme Masyumi yang secara positif memandang pluralisme telah mendorong Masyumi untuk bersikap terbuka. Keterbukaan itu tampak dalam kesediaannya untuk bekerjasama dengan golongan lain dalam mencapai tujuan Masyumi. Kerjasama ini pada awalnya dilakukan secara luas dan tanpa batas, sehingga di zaman revolusi itu pun Masyumi bersedia juga bekerjasama dengan golongan Komunis berhaluan Trotskyis di bawah pimpinan Tan Malaka.¹⁰

Kerjasama Masyumi dengan PKI, yaitu Komunis berhaluan Stalinis di bawah pimpinan Muso, sedikit sekali. Pada waktu sekelompok orang PKI mencoba untuk merebut kekuasaan, yang dimulai dari Madiun pada 18 September 1948, para pemimpinnya mendesak rakyat untuk menentang "Kabinet Masyumi yang dipimpin oleh Perdana Menteri Hatta." Kaum Komunis menuduh bahwa Hatta dan tokoh-tokoh Masyumi adalah "borjuis" dan "antek imperialis Amerika." Menurut tokoh-tokoh Komunis, berharap kepada "kemurahan hati Amerika" dalam menyelesaikan sengketa Indonesia-

Belanda adalah "harapan sia-sia," karena Amerika Serikat juga imperialis. Satu-satunya jalan yang mungkin bagi Indonesia untuk menang melawan Belanda adalah jika Indonesia bersekutu dengan Uni Soviet. Negara Komunis ini, menurut Muso telah "anti-imperialisme dan kolonialisme."¹¹

Perang pamflet dan perkelahian antara pendukung Masyumi dan pendukung FDR (Front Demokrasi Rakyat)¹² yang beraliran Komunis dan dipimpin oleh Muso itu menjadi sengit setelah Agustus 1948. Akhirnya, meletuslah "Pemberontakan Komunis di Madiun" pada tanggal 18 September 1948. Bendera merah putih diturunkan dan kemudian digantikan dengan bendera "palu arit". Dalam pemberontakan itu, ribuan rakyat, polisi, dan pasukan yang anti Komunis terbunuh.¹³ Begitu juga banyak orang yang mendukung Komunis juga ikut terbunuh.

Masyumi mengutuk keras pemberontakan FDR, dan menuduh kaum Komunis sebagai "pengkhianat terhadap bangsa dan negara." Sejak peristiwa itu pula, Masyumi mulai mengganti sikapnya dalam bekerjasama dengan kaum Komunis ke arah yang sangat *rigid*. Ada yang berdalih bahwa bekerjasama dengan "kaum anti Tuhan, anti agama, dan anti demokrasi" tidak boleh dilakukan untuk selama-lamanya.¹⁴ Sikap-sikap permusuhan antara Masyumi dan kaum Komunis, yang kemudian ditujukan secara langsung kepada PKI, berlanjut hingga Masyumi itu terpaksa membubarkan diri pada tahun 1960.¹⁵

Sikap permusuhan Masyumi terhadap PKI antara lain ditunjukkan pada sikap politik PKI yang telah menghalalkan segala cara, dan prinsip-prinsip Komunisme yang diannut PKI berlawanan secara diametral dengan prinsip-prinsip keagamaan yang dianut oleh Masyumi. Pernyataan bahwa PKI pada 1954 menerima Pancasila sebagai dasar negara, bagi

Masyumi merupakan suatu hal yang aneh dan tidak mungkin sepenuh hati, karena Komunisme pada dasarnya tidak mengakui adanya Tuhan. Karena itulah, Muhammad Rusjad Nurdin dari Masyumi mempertanyakan di Konstituante apakah kaum Komunis menerima Pancasila dengan sebenarnya atau hanya di lidah saja. Mengutip pasal 13 Program Partai Komunis Rusia, bahwa "tiap-tiap anggota Partai Komunis tidak boleh beragama dan diharuskan mengambil bagian dengan giat untuk menghentikannya,"¹⁶ Muhammad Rusjad Nurdin menandaskan bahwa "tidaklah mungkin Partai Komunis Indonesia (PKI) dapat menerima Pancasila yang memuat pada sila pertamanya Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa, yang ditentang oleh Komunisme."¹⁷

Dengan mencermati persoalan tersebut, beberapa pokok pikiran penting yang ingin diurai dalam buku ini antara lain bagaimanakah wacana ideologi Masyumi tentang Komunisme yang diperjuangkan PKI. Pertanyaan ini diharapkan dapat menjawab persoalan selanjutnya tentang bentuk-bentuk perjuangan Masyumi menghadapi PKI pada era Demokrasi Liberal. Implikasi yang diharapkan tentunya adalah adanya formulasi dan implikasi dari perjuangan Masyumi dalam menghadapi PKI selama era Demokrasi Liberal. Seluruh proses perjuangan Masyumi menghadapi komunisme tersebut dilihat dalam perspektif pendidikan politik untuk rakyat Indonesia oleh Masyumi. Dalam konteks ini, maka relevansi buku ini selain untuk menyingkap dinamika sejarah itu, adalah juga untuk mewarisi dan mencermati strategi pendidikan politik yang diterapkan oleh Masyumi.